

Politik Uang dan Perubahan Pandangan Politik di Kecamatan Pagelaran Pasca Runtuhnya Orde Baru

Money Politics and Political Changes in Kecamatan Pagelaran After The Collapse of The Orde Baru

Lhotse Sumarno*, Nanda Harda Meiji & Deny Wahyu Apriyadi

Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial,
Universitas Negeri Malang, Indonesia

Diterima: 27 Desember 2021; Direview: 27 Desember 2021; Disetujui: 16 Februari 2022

*Corresponding Email: lhotse.soemarno@gmail.com

Abstrak

Disaat ini dunia perpolitikan terus menjadi tidak menentu arah pergerakannya akibat terdapatnya politik uang. demikian juga di Kecamatan Pagelaran yang mana daerah ini menjadi daerah pemilihan 1 Kabupaten Malang. Partai politik saling berebut dalam mencari suara melalui politik uang. Apalagi beberapa dari mereka ada yang berhasil untuk masuk ke daftar calon legislatif pada Pemilu 2019 lalu. Penelitian ini Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif dengan observasi dan wawancara guna mendapatkan informasi serta menganalisa keterlibatan warga tersebut dalam dunia politik. Paling utama terkait perubahan pandangan politik yang disebabkan oleh uang. Memakai model *purposive sampling*, pemilihan informan dalam penelitian kali ini lebih menitikberatkan pada caleg yang melakukan perubahan partai dalam politiknya. Akan tetapi sepertinya masih ada bermacam trik guna memperoleh suara dari masyarakat. Masih terdapat cara cara pragmatis semacam penggunaan barang maupun jasa guna memuluskan jalan menjadi caleg. Perihal tersebut yang kemudian menimbulkan penggunaan uang dalam makna berbeda yakni bisa membeli suara warga. Meskipun begitu Politik uang diterima karena anggapan bahwa menolak rejeki bukanlah hal yang baik. Sejak awal masyarakat telah mengetahui adanya motif dan tujuan dari calon. Namun di sisi lain, masyarakat telah memiliki kriteria calon sendiri tanpa paksaan dari politik uang.

Kata Kunci: Identitas; Politik Uang; Perubahan Pandangan Politik

Abstract

Nowdays As the world of politics continues to be uncertain as a result of the political struggle of money. So it is in the district district where this area becomes the county's most unfortunate election. Political parties scramble for votes through the politics of money. Moreover, some of them managed to make it to the legislative candidate list in the 2019 elections. The study USES qualitative methods with a descriptive qualitative approach with observation and interviews to inform and analyze the involvement of the citizen in politics. It comes down to a change in politics caused by money. Using an impressive sampling model, the selection of informants in this research was more important to caleg's changing party in his politics. But there seems to be various tricks to get people to vote. There are still pragmatic ways of using both goods and services to smooth the road into a caleg. This led to a different use of money in the sense of buying out citizens' votes. However, the politics of money is accepted because of the notion that it is not good to refuse money. People have known from the beginning the motives and goals of the candidate. But on the other hand, society has its own set of candidates without force from the politics of money.

Keywords: Identity; Money Politics; Political Changed

How to cite: Sumarno, L., Meiji, N.H., & Apriyadi, D.W., (2022), Politik Uang dan Perubahan Pandangan Politik di Kecamatan Pagelaran Pasca Runtuhnya Orde Baru, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 4(4): 2269-2281



PENDAHULUAN

Dalam konteks sejarah sosial dan politik di Indonesia, bermacam golongan menempatkan diri dalam perjuangan Indonesia. Perihal tersebut dapat dilihat dalam konteks para golongan seperti kaum Brahmana bereposisi menjadi golongan santri kelompok keagamaan, lalu kaum ksatria bereposisi menjadi kaum Priyai diisi oleh kelompok kebangsaan, pedagang dan militer, dan terakhir adalah kaum sudra bereposisi menjadi abangan atau bisa dikenal sebagai “wong cilik”. Warisan ini merupakan turunan dari kerajaan Hindu Buddha, khususnya Majapahit. Meskipun sudah sangat lama semenjak kerajaan tersebut eksis, tetapi melihat adanya pola kehidupan masyarakat yang dianut oleh ketiga golongan tersebut belum berubah secara spesifik. (Ricklefs, 2008) sehingga para golongan ini mempunyai andil dalam tiap lahirnya periode Indonesia.

Seperti suatu siklus dimana golongan ini selaku agen agen dalam transformasi politik untuk bangsa Indonesia. Memasuki awal sebuah evolusi arus kelompok identitas yang awalnya hanya dikenal sebagai *politik aliran*. Kemudian berubah menjadi yang dikenal hari ini yaitu *politik identitas*. Dalam konteks masyarakat, diawal terdapat tiga penggolongan yaitu *subratira* (Sudra, Brahma, Ksatria), lalu berubah menjadi *asanpri* (Abangan, Santri, Priyayi), memasuki era Sukarno dicetuskan *Nasakom* (Komunis, Agama, Nasionalis) (Geertz, 1960) hingga memasuki era Orde Baru ketiga golongan tersebut terjun ke arena politik dengan mendirikan partai. Namun sejak pemilu 1977 dengan adanya kebijakan fusi partai di tahun 1973 maka pemilu hanya diikuti oleh 3 partai politik (PPP, PDI, Golkar) yang mana erat kaitannya dengan identitas ke tiga golongan.

Sehingga dapat dilihat sebuah pola yang sama yaitu ketiga kelas sosial atau golongan ini tetap eksis dan bertahan hingga hari ini. Pandangan politik juga dipengaruhi oleh agama, ekonomi. Dalam hal ini Tidak sedikit, isu agama “digoreng” sebagai kendaraan guna memenangkan kursi pemerintahan Dalam menghadapi Pemilu. Termasuk politik uang, terlebih lagi pada disaat ini, politik uang yang kerap berlangsung pada masa Pemilu, seolah jadi ketentuan yang harus, untuk tiap calon pejabat baik yang berada di tingkatan pusat ataupun wilayah, guna memperoleh dukungan serta suara paling banyak dari masyarakat, pastinya apabila perihal ini terus dibiarkan begitu saja, sehingga akan sangat mungkin realita tentang politik uang ini seakan akan menjadi sebuah budaya ataupun tradisi di dalam pemilu itu sendiri, sehingga bisa mencoreng makna serta arti dari demokrasi yang sesungguhnya (Fitriani et al., 2019).

Meskipun tidak sedikit terdapat potret buram seperti politik uang yang ada di bidang perpolitikan Indonesia, akan tetapi seperti partai politik tetap menarik untuk masing-masing golongan. Pastinya sebagai suatu peluang sekaligus kesempatan untuk para golongan tersebut guna masuk serta mengekspresikan diri di dalam sebuah partai politik. Sebagaimana diketahui dalam masa demokrasi seperti disaat ini, partai politik jadi salah satu aspek dominan. Partai politik yang menjembatani antara pihak penguasa (pemerintah) dan masyarakat/golongan (konstituen). Bergabungnya para golongan golongan ini pada partai politik pastinya jadi suatu keinginan terkait kontribusi langsung dari mereka di dalam dunia politik.

Dalam tulisan ini penulis berusaha untuk mengembangkan dari riset sebelumnya yang dilakukan oleh Hiroyoshi Kano di Desa Pagelaran. Penelitian tersebut berusaha menjelaskan praktik politik yang ada di Desa Pagelaran dari era orde lama ke era orde baru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perubahan pandangan politik dari politik aliran ke politik identitas pada periode tersebut. Namun apa yang dititikberatkan pada penelitian kali ini ialah tentang perubahan pandangan politik pasca reformasi terutama berkaitan dengan politik uang. Budaya politik uang ialah perihal umum dalam masyarakat Indonesia.

Politik uang juga bisa diartikan sebagai suatu upaya guna mempengaruhi orang lain. Pengaruh tersebut digunakan untuk memilih calon yang memberikan suatu imbalan. Ada juga yang mengartikan bahwa ada semacam jual beli suara dalam proses pemilihan politik mulai dari pemilihan kepala desa sampai pemilihan umum suatu negara (Ismawan, 1999). Namun politik uang yang terjadi tidak diproses secara hukum. Masyarakat juga menerima bahkan merasa diuntungkan dengan hal tersebut (Putri et al., 2020). Fenomena politik uang dalam masyarakat Indonesia dapat dilihat secara langsung, seperti dalam proses pemilihan kepala desa selaku bagian terkecil dari pemerintahan Indonesia.



Dalam prosesnya pencalonan kepala desa kerap kali tidak terlepas dari penggunaan uang sebagai cara untuk menarik simpati masyarakat. Dalam lingkup yang lebih luas, penerapan politik uang sudah nyaris di segala segmen sosial semacam pejabat, politisi, akademisi, petani kaya, bahkan golongan pemuka agama sekalipun (Rimbing, 2015). Calon kepala desa menggunakan praktik politik uang sebagai cara dalam mempengaruhi pilihan dari pemilih (Fauzi, 2018). Calon kepala desa umumnya meyakini bahwa dengan menggunakan politik uang masih dianggap efektif untuk memenangkan kontestasi politik (Fauzi, 2018). Bahkan cara yang dilakukan oleh calon kepala desa cukup beragam, seperti penggunaan uang mulai digantikan dengan memberi barang kepada pemilik hak suara. Pemberian dapat berupa pakaian, sembako, dan lain-lain (Fauzi, A., Sudrajat, A., Affandi, A., & Raditya, 2018)

Dalam sebuah perspektif sosiologi politik, fenomena dalam dukungan politis ini dapat dimengerti selaku bentuk sistem pertukaran sosial yang biasa terjalin pada kenyataan politik. Sebab interaksi dalam politik memanglah memastikan perilaku seseorang guna dipenuhi oleh pengharapan timbal balik. Hubungan timbal balik ialah dasar untuk sistem pertukaran sosial yang seimbang. Sikap politik uang, pada konteks politik saat ini, kerap kali mengatasnamakan bentuk dukungan, dan lain-lain. Pergeseran istilah politik uang secara tidak langsung sudah menciptakan perlindungan melalui norma kultural masyarakat yang memang menganggap lazim aksi itu terjadi (Rimbing, 2015).

Politik uang juga bisa diartikan sebagai suatu upaya guna mempengaruhi orang lain. Pengaruh tersebut digunakan untuk memilih calon yang memberikan suatu imbalan. Ada juga yang mengartikan bahwa ada semacam jual beli suara dalam proses pemilihan politik mulai dari pemilihan kepala desa sampai pemilihan umum suatu negara (Ismawan, 1999). Namun politik uang yang terjadi tidak diproses secara hukum. Masyarakat juga menerima bahkan merasa diuntungkan dengan hal tersebut (Putri et al., 2020). Fenomena politik uang dalam masyarakat Indonesia dapat dilihat secara langsung, seperti dalam proses pemilihan kepala desa selaku bagian terkecil dari pemerintahan Indonesia.

Praktik politik uang nampaknya selaras dengan tingkat pendidikan masyarakat (Wahyu, 2015). Apabila semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat maka semakin rendah praktik politik uang (Putri et al., 2020). Seperti pada Masyarakat perkotaan yang memiliki tingkat pendidikan hingga perguruan tinggi sehingga mereka terbuka akan teknologi dan informasi (Wismabrata, 2019) Lain halnya dengan masyarakat pedesaan yang masih tertutup akan sebuah perubahan dan tidak sedikit orang yang masih belum dapat beradaptasi dengan majunya teknologi dan informasi. Hal tersebut merupakan salah satu yang berpengaruh terhadap tingkat partisipasi dalam pemilu (Agustin, 2018).

Seperti dinamika perpolitikan di tingkatan nasional, Desa Pagelaran pun mempunyai cerita perihal dunia perpolitikan lebih-lebih terkait pemilihan kepala daerah sampai pemilihan presiden. Dalam penelitian ini mengangkat salah satu Partai Politik di daerah Kecamatan Pagelaran sebagai bahan kajian. Hal ini melihat agak kuatnya posisi partai tersebut di daerah Kecamatan Pagelaran semenjak paska reformasi sampai dikala pemilu legislatif 2019 kemarin. Tidak hanya mengambil fokus pada dinamika politik uang di dalam partai tersebut, riset ini berupaya memandang politik pengaruh politik uang di dalamnya. Tidak cuma itu, penelitian ini pula menyingkap bagaimana uang bisa mempengaruhi pemikiran maupun preferensi politiknya.

Landasan analisis pada riset ini akan menggunakan teori dari Georg simmel tentang filsafat uang yang berorientasi pada pengaruh uang. Pada teori ini dapat melihat bagaimana pengaruh uang mampu memberikan nilai berbeda pada setiap individu. Analisis Georg simmel melihat uang dan individu mempengaruhi tindakan maupun nilainya (Suharyono, 2020). Seperti yang diungkapkan oleh Georg simmel tentang Manusia menjadi seperti uang, tidak bisa dibedakan jumlahnya, manusia sebagai makhluk yang independen dan fleksibel dengan mengorbankan identitas namun dapat digantikan uang. Sama seperti nilai-nilai kehilangan kualitas dan karakter individu mereka untuk diabstraksikan menjadi bentuk uang yang murni dan terkuantifikasi, individu-individu menemukan diri mereka dihilangkan dari ikatan partikularisasi pekerjaan

khusus mereka dan gaya hidup sebagai nilai dari hal-hal tersebut dinyatakan dalam uang tunai netral (Suharyono, 2020).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diambil merupakan metode penelitian secara kualitatif. Metode penelitian secara kualitatif menurut Masri singaribun dalam (Rimbing, 2015) merupakan metode penelitian yang tujuannya untuk menjelaskan secara mendalam terkait suatu fenomena sosial tertentu. Pendekatan pada penelitian kali ini adalah pendekatan dengan metode kualitatif deskriptif, dapat dimaknai semacam mekanisme pemecahan masalah yang ditelaah dengan menggambarkan ataupun menerangkan subjek ataupun objek penelitian diantaranya seperti seseorang dan masyarakat pada saat ini bersumber pada kenyataan yang nampak ataupun sebagaimana adanya. Data yang diperoleh akan dianalisis serta dijelaskan berdasarkan pada temuan fakta-fakta penelitian di lapangan (Rimbing, 2015).

Peneliti juga melakukan pemilihan informan, adapun informan yang terpilih ialah memiliki kriteria yang mampu menjelaskan secara sesuai pada latar penelitian. Oleh karena itu seorang informan harus benar-benar tahu atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Memilih seorang informan harus dilihat kompetensinya bukan hanya sekedar untuk menghadirkannya (Moleong, 2006). Sehingga peneliti mendapatkan 10 informan dalam penelitian kali ini, Berikut ini merupakan informan informan yang menjadi sumber data dalam penelitian kali ini adalah seorang calon legislatif, demisioner partai, mantan anggota partai. Namun peneliti hanya memilih 3 dari 10 informan untuk menjadi informan utama dalam penelitian kali ini disebabkan ketiga informan tersebut paling sering melakukan perubahan pandangan politik daripada informan lainnya.

Penelitian dan pengambilan data dalam hal ini peneliti berupaya menggambarkan perubahan pandangan politik selama ini yang dijalankan dan dirasakan oleh masing-masing anggota partai politik di Desa Pagelaran. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah instrumen penelitian sebagai Salah satu ciri utama penelitian kualitatif yang mana manusia sangat berperan dalam keseluruhan proses penelitian, termasuk dalam pengumpulan data, bahkan peneliti itu sendirilah instrumennya (Moleong, 2006). Tidak sekedar itu peneliti pun berupaya mendalami makna pada gerak-gerak maupun tindakan informan selama melakukan interaksi maupun aktivitas. Adapun fokus penelitian kali ini adalah Perubahan pandangan politik yang dipengaruhi oleh uang.

Adapun data yang dikumpulkan terdiri atas data primer maupun sekunder. Data primer dikumpulkan pada saat melakukan penelitian di lapangan seperti wawancara, observasi. Pun didukung dengan data sekunder berupa penelitian terdahulu maupun buku buku yang relevan dengan penelitian ini. Data primer berasal dari informan, adapun informan yang dipilih yaitu pelaksanaan pemilu, calon legislatif, demisioner partai, mantan anggota partai.

Dalam pengumpulan data ini peneliti tak hanya memandang informasi dari sisi personal informan semata, bagi peneliti penting untuk melihat faktor lain dari informan, seperti sistem sosial yang ada di lingkungannya. Proses pengambilan data tidak hanya berpaku pada hasil wawancara dengan informan (kader partai), tetapi juga berupaya memperoleh informasi pendukung melalui lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, riwayat informan sebagai pengantar bagi peneliti dalam memahami serta menghubungkannya dengan kegiatan para informan di dalam partai politik saat ini.

Teknik analisis data yang digunakan sebagaimana dikemukakan Miles dan Huberman, yaitu dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis meliputi reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) serta Penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/verification) (Miles, M. , & A.M., 2009). Oleh karena itu dalam mengumpulkan data dilakukan dengan cara menuliskan, mengedit, mengklasifikasikan, mereduksi, menyajikan dan mendeskripsikan mengenai politik uang dalam Perubahan pandangan politik di Kecamatan Pagelaran.

Dasar menggunakan model penelitian ini ialah guna mengungkap kenyataan politik uang di dalam masyarakat yang tergabung ke dalam partai politik. Manakala mulanya lebih berkenaan

dengan golongan atau identitas maka pada kesempatan ini penelitian lebih berfokus pada perubahan pandangan politik dengan cara yang beragam, baik secara politik identitas maupun politik uang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Pagelaran, kabupaten Malang Selatan, merupakan Kecamatan pemekaran dari ibu kota Kabupaten Malang sekitar 12Km. yang terdiri dari 10 Kelurahan yaitu, Balarjo, Banjarejo, Brongkal, Clumprit, Kademangan, Kanigoro, Karangsono, Pagelaran, Sidorejo, Suwaru. Kecamatan pagelaran memiliki jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 67.412 jiwa, yang terdiri dari 33.861 penduduk Laki laki dan 33.551 perempuan. Terdapat sedikitnya ada 7 jenis pekerjaan yang ada di masyarakat terdiri dari bermata pencaharian sebagai petani selain itu terdapat buruh tani, wiraswasta, peternak, pedagang, PNS maupun TKI

Latar Belakang Calon Legislatif Kecamatan Pagelaran

Gambaran latar belakang calon legislatif Kecamatan Pagelaran yang menjadi dapil 1 di Kabupaten Malang. AK merupakan calon yang berasal dari partai Abangan. Beliau sebelumnya pernah mencalonkan diri untuk menjadi caleg namun mendadak mengundurkan diri karena ada permasalahan dalam partainya. Namun dalam hal ini warga sudah memiliki penilaian baik pada AK.

AK yang juga bekerja menjadi ketua organisasi perempuan keagamaan tersebut dirasa masyarakat memiliki kinerja yang baik. Beberapa informan lainnya mengatakan bahwa banyak sekali berita baik yang tersebar di kalangan warga desa terkait dengan AK. Beberapa berita yang tersebar salah satunya adalah keberhasilan AK dalam membuat sebuah gedung serbaguna di desanya. Sehingga masyarakat menilai bahwa AK memiliki pengaruh baik kepada desanya.

Calon kedua adalah AB. Calon ini merupakan orang yang cukup dekat bagi masyarakat. Beberapa warga memahami calon ini. AB dikenal sering terlihat bersama dengan masyarakat. Namun beberapa masyarakat mengatakan bahwa AB seringkali memilih dengan urusan partai dan muncul hanya ketika musim pemilihan. Sehingga AB dinilai kurang dapat berbaur dengan warga. Terutama bagi warga yang berasal dari kalangan keagamaan. Namun, latar belakangnya yang pernah mengikuti perpolitikan di Kecamatan Pagelaran dikarenakan pernah menjabat sebagai perangkat desa hal ini juga menjadi hal yang penting. apabila melihat calon-calon lainnya AB tentunya lebih unggul karena calon lainnya rata-rata hanya menjadi masyarakat biasa yang ingin maju ke legislatif.

Calon ketiga adalah TH. TH ini sudah bukan orang asing bagi masyarakat. Bahkan banyak sekali masyarakat yang mengenal sosok beliau dan paham dengan latar belakang beliau. Beliau dikenal warga karena pribadinya yang sangat ramah. Beliau terkenal juga karena beliau merupakan ketua pondok pesantren dan juga alumni gerakan mahasiswa nasional indonesia di Kecamatan tersebut. sebelum beliau mencalonkan diri menjadi caleg beliau sudah sangat dekat dengan masyarakat. Hal itu terjadi ketika beliau masih sering mengisi acara besar keagamaan. Saat itu beliau membangun keakrabannya dengan masyarakat desa. Masyarakat juga mengatakan bahwa TH memiliki pengetahuan yang luas. Meskipun begitu beliau sering berkumpul dengan masyarakat hanya untuk meminum kopi. Seringkali juga TH membelikan beberapa makanan untuk masyarakat yang sedang berkumpul dengannya saat itu. Hal itulah yang kemudian membuat warga menganggap bahwa TH merupakan calon yang dapat dengan mudah berbaur dengan warga dari kalangan manapun.

Kriteria calon legislatif yang diinginkan oleh masyarakat

Kriteria partai politik merupakan karakter yang diinginkan oleh masyarakat dengan berbagai patokan bagi calon legislatif. Berdasarkan hasil temuan data bahwa calon legislatif memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Selain itu, dalam pemilihan setiap calon akan melakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat untuk memilihnya pada pemilihan umum. Setiap calon memiliki karakter atau sifat yang berbeda-beda. Berdasarkan pernyataan yang

dikemukakan oleh informan, bahwa karakter yang dimiliki setiap calon dapat diketahui menurut kehidupan sehari-harinya.

Kehidupan sehari-hari bersama masyarakat atau aktivitas yang sering dilakukan bersama masyarakat dan adanya kontak komunikasi setiap harinya, masyarakat dapat menilai sendiri karakter dari masing-masing calon. Calon legislatif yang memiliki pendidikan tinggi tentu sangat diharapkan oleh masyarakat. Namun, di samping itu masyarakat lebih menilai cara bersikap dan bentuk kesehariannya. Kepribadian calon pemimpin ternyata juga menjadi penilaian penting dari masyarakat disamping pendidikan tinggi. Masyarakat Desa tersebut memahami karakteristik bakal calon Kepala Desa yang telah dikenal sebelumnya, dalam aktivitas kemasyarakatan. Oleh karena itu, masyarakat dalam memilih memiliki kriteria berbeda-beda untuk setiap calon. Dari semua caleg yang kami wawancarai mereka menjawab bahwa seorang yang mereka inginkan menjadi seorang caleg adalah mereka yang memiliki pribadi yang ramah dan juga sangat merakyat.

Selain itu, mereka juga menginginkan memiliki caleg dari daerahnya yang berpendidikan yang tinggi. Hal ini dikarenakan pendidikan tinggi dapat memberikan perubahan bagi Kecamatan maupun desanya. Setidaknya dengan pendidikan tinggi yang dimiliki mampu memberikan pengetahuan kepada masyarakat yang masih belum mendapatkan pendidikan tinggi. Dari semua calon tersebut beberapa dari mereka memiliki karakter tersebut. Namun, ada kelebihan dan kekurangan pada calon. Salah satu warga menyebutkan beliau menginginkan AK untuk menjadi caleg Kecamatan. Alasannya AK memiliki latar belakang organisasi yang baik. Dimana memang organisasi tersebut juga menjadi nilai tinggi untuk masyarakat sebagai kriteria memilih. Dengan organisasi yang baik dan sikap baik diharapkan mampu membawa desa ke arah yang lebih maju.

Politik Uang dalam Pengaruh Perubahan Pandangan Politik

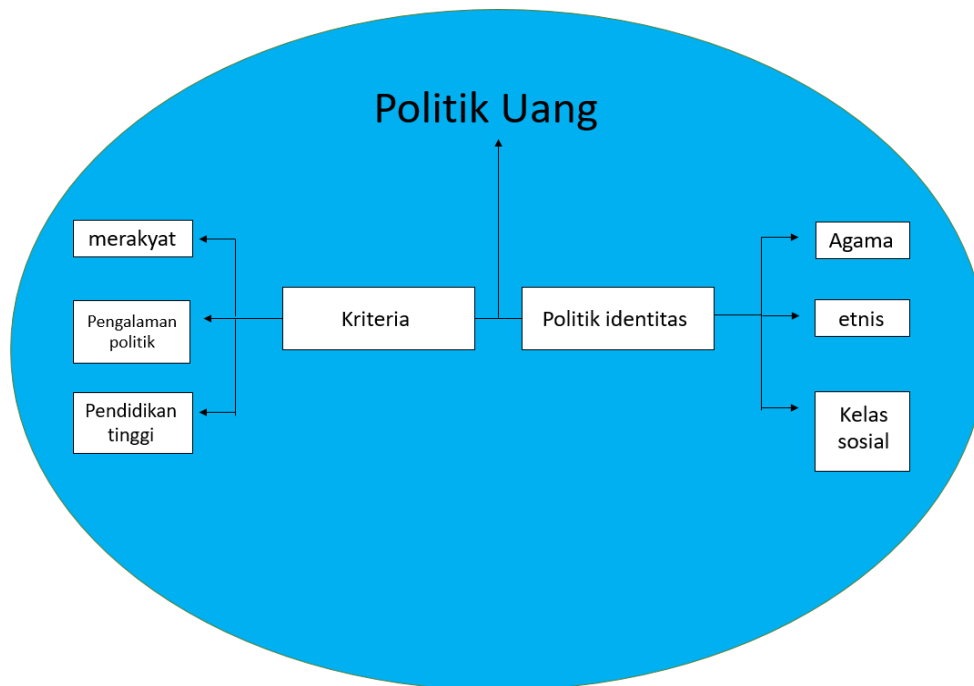
Seperti halnya yang diuraikan pada sub bab sebelumnya yaitu terdapat politik uang dalam masyarakat. Dalam hal ini terlebih tentang pengaruh uang bagi masing masing informan yang menjadi indikator para informan akan masuk kategori sebagai informan utama. Dalam beberapa kultur politik uang, jumlah uang masih jadi penanda kategorisasi seseorang mau melakukan perubahan pandangan politik. Begitu juga di partai politik pada kajian ini yang mana pengaruh uang tetap saja jadi indikator sederhana dalam mengetahui politik uang.

Politik uang merupakan sebuah bagian penting dalam memenangkan pentas politik. Jauh dari berita buruk mengenai partai politik, setiap partai tetap mempunyai cara tersendiri mengenai usahanya memenangkan pemilihan dengan baik. Hal tersebut dipertahankan guna partai dapat memperoleh suara terbesar. Oleh sebab itu politik identitas maupun politik uang sangat diperlukan selain untuk meningkatkan jumlah pemilih berdasarkan identitas.

Bagi M. Abdul Kholiq dalam (Gustia, 2015), politik uang merupakan suatu aksi memberikan uang ataupun berupa materi baik yang kepemilikan aset dari seorang caleg (calon legislatif) ataupun aset partai guna memenangkan suara pemilu yang diselenggarakan. Jadi politik uang ialah upaya memenangkan sekaligus memberi pengaruh kepada orang lain dengan memberikan imbalan uang maupun materi pada proses politik serta kekuasaan saat pemilihan umum. Pada kajian ini teori pertukaran dalam sosiologi melihat jika seseorang terus ikut serta dalam memilih beberapa perilaku-perilaku alternatif, dengan preferensi mencerminkan *cost and reward* (bayaran serta keuntungan) yang diharapkan berkaitan dengan perilaku *alternative* tersebut, dapat dikatakan kalau sesuatu aksi ialah rasional bersumber pada perhitungan untung rugi (Damsar, 2015).

Bagi Syarif Hidayat dalam (Gustia, 2015), penerapan politik uang diawali dari proses nominasi kandidat, sepanjang masa kampanye, sampai hari- H pemilihan kala suara dihitung. Terdapat 2 tipe politik uang ialah, secara langsung dengan membagikan uang kepada calon pemilih. Maupun secara tidak langsung dengan membagikan bermacam barang yang mempunyai nilai guna maupun nilai tukar yang besar. Memakai teori pertukaran ini kita dapat melihat kalau fenomena politik uang berlangsung tidak terlepas dari proses interaksi sosial antara individu dengan calon legislatif pada pelaksanaan pemilu (Fitriani et al., 2019)

Sehingga bisa ditarik suatu uraian kalau teori pertukaran mempunyai anggapan bahwa pada dasarnya manusia sebagai makhluk rasional yang mengkalkulasikan antara untung dan rugi (Damsar, 2015). Oleh karena itu, semakin besar keuntungan yang didapat dalam politik uang sehingga bakal terus menjadi besar mungkin sikap tersebut akan diulang. Kebalikannya semakin besar bayaran ataupun ancaman hukuman yang hendak didapat hingga makin kecil peluang sikap yang sama akan diulangi (Fitriani et al., 2019). Konsep-konsep ini yang setelah itu menggagas peneliti untuk berfokus pada bagaimana kader partai maupun pemilih saling terpengaruh di bawah pengaruh politik uang dalam pemilihan.



Sumber : olahan peneliti

Kader Partai bicara pengaruh politik uang

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa ketiga informan utama mempunyai latar belakang yang tidak sama. Paling tidak perihal kesimpulannya dipengaruhi oleh preferensi mereka untuk ikut serta dengan partai politik. Pada sub bab kali ini peneliti menjelaskan bagaimana bergabungnya mereka di dalam partai sampai mengapa mereka melakukan perubahan pandangan politik. Pengalaman dan juga kegiatan para informan sepanjang di dalam partai politik jadi salah satu informasi utama bagaimana mereka memandang sesuatu partai politik bersumber pada identitasnya ataupun bersumber pada keuntungannya.

AK, Ketua organisasi perempuan keagamaan sedang mempersiapkan untuk menjadi caleg. AK adalah kader paling muda yang menjadi informan dalam penelitian kali ini. Bapak AK bekerja sebagai perangkat desa di wilayah Kecamatan Pagelaran selama 35 tahun dan terlibat memilih Golongan tertentu karena tuntutan rezim Orde Baru. AK berasal dari keluarga yang religius, AK juga menjadi ketua organisasi yang diambilnya yaitu organisasi perempuan keagamaan. Oleh sebab itu lingkungan yang religius serta relasi yang cukup luas membuat AK percaya diri untuk mengikuti organisasi lainnya. Faktual selama hidupnya AK aktif terlibat dalam beberapa organisasi, terlebih AK merasa organisasi menjadi penting karena baginya organisasi merupakan tempat mendapatkan teman serta saudara baru. Tidak hanya di organisasi perempuan keagamaan tetapi ia juga menjadi ketua organisasi pemuda Indonesia di Kecamatan Pagelaran dan juga wakil ketua Pemuda Demokrasi tingkat Kabupaten. Hingga akhirnya ketertarikannya untuk ikut partai di dorong oleh keluarga dan juga AK beranggapan bahwa apabila masuk partai akan membantunya dalam berbagai urusan membantu untuk masyarakat.

“dulu dulu awal masuk musibah mas, kesel aku mas, duh duitku entek (habis) mas, iya kalo jadi dewan, kalo engga? bikin proposal apa apa duit keluar semua, orang kira kita orang penting padahal ga ada uangnya mas dipartai. Tapi ya intinya dari partai kita bisa berbuat banyak untuk masyarakat”

Hingga akhirnya saat dirinya berada di pengurus partai politik berhaluan abangan di Kecamatan Pagelaran, Awalnya AK masuk ke dalam pengurus sebelum akhirnya pindah haluan ke partai Nasional Demokrat. kemampuan dan pengalamannya selama bergabung dengan partai termasuk membuatnya mendapatkan kepercayaan dari pihak partai lain untuk mengajaknya masuk. Masa transisinya dalam berpindah partai berjalan lancar karena pimpinan partai barunya dekat dengannya. AK kemudian menjadi anggota partai Nasional Demokrat mulai dari 2014. Kemudian pada sekitar tahun 2016, AK memutuskan untuk mencoba untuk mencalonkan diri menjadi caleg partainya. AK sebenarnya masih percaya dengan keputusan mencalonkan dirinya sebagai caleg. Namun dikarenakan keputusan partai memberikan nomor terakhir membuat dirinya hilang kepercayaan atas partai barunya ini dan memutuskan untuk keluar dari partai tersebut.

“saya dulu masuk partai Nasional Demokrat 2 tahun habis dari partai abangan. lalu menjadi pengurus kabupaten, lalu saya ga jadi nyaleg karena saya dikasih nomer 6 dari 7 nomer dan saya gamau akhirnya saya putuskan untuk mundur dari partai dan akhirnya saya kembali lagi ke partai abangan”

Lantas mengapa terjadi perubahan pandangan politik dalam kehidupan berpolitik AK? Menurut AK berdasarkan pengalamannya selama berada di partai, baginya ke fanatikan seseorang dalam memilih pemimpin merupakan sebuah kesalahan karena dapat mempersulit dalam berbagai urusan untuk masyarakat. Ia juga merasa apabila kita melawan arus politik penguasa dampaknya akan merugikan baik secara pribadi maupun masyarakat. Alhasil AK melakukan manuver politiknya ke berbagai partai penguasa agar dapat terbantu baik secara pribadi maupun masyarakat. Menurutnya hal tersebut juga terkait dengan pendukung untuk pemilu. AK akhirnya tidak banyak berharap pada partai sebelumnya karena dianggap masih partai kecil, sehingga apabila ia tetap memaksakan untuk maju dalam pemilu pasti akan gagal. Ia lebih memilih untuk mencari partai baru sebagai kendaraan dalam persiapan pemilu selanjutnya di 2024. AK setidaknya ia mendapatkan dukungan lebih dari beberapa senior dan juga memiliki keberanian lebih untuk maju dalam menjadi Caleg.

“habis keluar dari partai Nasional demokrat kan saya memang dari dulu sudah terlihat aktif kan mas, makanya saya ditarik lagi ke partai meskipun cape ya mas di partai tapi saya doakan aja bismillah aja buat maju jadi caleg 2024 nanti. Ya ini semua kan karena banyak yang dukung jadi mulai dari sekarang saya persiapkan semuanya buat maju”

Dari Beberapa pengalamannya setelah gagal maju di pemilu sebelumnya kini AK mempersiapkan baik dari partai pendukung, kekuatan modal maupun massa. Majunya AK dalam pemilu 2024 Baginya perihal majunya AK membuat dirinya bangga mengingat partai barunya merupakan salah satu partai besar tidak hanya di Kabupaten Malang namun juga di Indonesia. AK juga membenarkan bahwa tren saat ini yang terjadi adalah adanya politik uang, namun baginya terkadang uang bukan segalanya. Baginya dalam politik uang selain membutuhkan uang namun juga strategi dan penyusunan anggota yang perlu diurus jauh hari sebelum adanya pemilu.

AB, Petani menjadi wakil ketua partai tingkat Kabupaten. AB merupakan Wakil Ketua dari partainya sekaligus mantan caleg dalam penelitian kali ini. Dibesarkan oleh Bapak seorang kuli bangunan dan petani. Meskipun secara ekonomi sebelum bertani AB adalah seorang perangkat di desanya. Namun Kondisi keuangan yang menengah kebawah membuat AB memutuskan untuk keluar dari perangkat desa menjadi petani dengan modal seadanya. Meskipun diawal kesulitan membangun bisnisnya yaitu penggilingan padi karena terkendala pendanaan. Beruntung saat ini AB sudah mendapat banyak bantuan termasuk dari partai yang dulu ia dukung. Hal ini lah yang juga menjadi faktor AB tertarik terjun di dunia politik.

“dulu pas jadi perangkat desa ya duitnya pas pasan mas ga berkembang kita. Akhirnya saya usaha penggilingan jadi Bonek dengan modal pas pasan sampai akhirnya sebesar ini. Setelah

saya besar gini akhirnya kan ditarik sama pak AW buat jadi anggota partai, dia dateng kerumah nawarin buat saya dan akhirnya saya mau waktu itu."

AB melihat sebuah partai sebagai sebuah tempat bekerja meskipun secara pendapatan berupa gaji pokok tidak ada. Namun bagi AB penting baginya memilih sebuah partai yang kuat secara finansial maupun relasi. Hal ini juga mempengaruhi keuntungan terhadap bisnisnya sebagai penggilingan padi. Ali juga mengungkapkan bahwa partai kecil tidak banyak memberikan dampak signifikan pada masyarakat sekitar. Bahkan AB juga mengungkapkan keuntungan lainnya dengan memasuki partai penguasa, nama pribadi akan dapat dikenal oleh orang partai maupun non partai. Hal tersebut yang membuatnya tetap bertahan di dalam kepengurusan partai hingga hari ini.

Bagi AB apabila masuk dalam partai ia mengungkapkan untuk bekerja di dalam partai, bukan sebagai pekerja partai. Menurut AB apabila memiliki sebuah usaha, sebaiknya usaha itu di ajukan ke partai agar nantinya dapat menjadi tempat rezeki untuk kader tersebut. Baginya partai politik adalah tempat bekerja untuk mengembangkan usaha sekaligus tempat mencari relasi. Tidak hanya itu, AB juga mengakui masuk sebuah partai dirinya menginginkan timbal balik atas partai yang ia dukung. Dari timbal balik inilah yang membuat Keluarga Ali tetap mendukung Ali tetap berada di partainya saat ini. Selain itu dari timbal balik juga Ali mengembangkan bisnisnya sekaligus dapat membantu warga yang kesulitan.

"saya kan punya usaha beras, ya saya masukan ke partai mas kan lumayan dari sini (partai) saya bisa ngembangin usaha saya. Semisal ada bencana saya langsung dihubungin dari partai buat pasokan beras. Ya karena usaha juga lancar, bisnis juga berkembang akhirnya kan keluarga ya mendukung mas. Kalo seandainya merugikan ya ngapain"

Lalu bagaimana terjadi perubahan pandangan politik dalam kehidupan politik AB? AB mempunyai pendapat berbeda dengan AK, bagi AB sosok figur pemimpin partai sangat mempengaruhi ketertarikan seseorang dalam bergabung dalam sebuah partai. Ia juga merasa apabila sosok tersebut merupakan seorang penguasa atas daerahnya tidak heran apabila mempunyai banyak pengikut yang loyal. AB juga mengungkapkan apabila pemimpin tersebut merupakan teman seperjuangan atau pemimpin tersebut pernah membantu dalam kesulitan. Dapat dipastikan bahwa pemimpin tersebut layak diikuti. Alhasil ketika pemimpin dari partai Golongan Berkarya di daerahnya yang juga merupakan teman dekatnya pindah ke partai Nasional Demokrasi membuat AB memutuskan mengikuti jejak temannya untuk pindah partai.

"dulu itu ketika ada pemilihan pengurus kecamatan partai golongan karya saya itu udah ditunjuk dari DPP terus juga warga 8 dari 10 desa itu dukung saya mas. Tapi berhubung saya melihat teman saya mau pindah ke Nasional Demokrat ya saya ikut mas apalagi dia namanya udah terkenal dan penguasa."

TH Ketua pondok pesantren. TH yang lahir pada tahun 45 tahun lalu ini merupakan wakil ketua DPP partai tingkat Kabupaten. TH merupakan pemimpin pondok pesantren di Kabupaten Malang. Menurutnya hal yang membuatnya tertarik dalam perihal politik yang tidak dapat dilepaskan dari masa lalunya dengan pernah bergabung Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia selama masa kuliah di salah satu Universitas di Kota Malang. Dibesarkan oleh bapaknya seorang pemimpin pondok pesantren. Kemudian bapak TH selama masa Orde Baru menjadi kader Golongan berkarya.

Baginya keterlibatan partai merupakan hal yang penting khususnya partai penguasa agar golongan mendapat perlindungan. Terkait dengan berpindah-pindahannya ia hingga ke partai lainnya. TH berpindah pindah politik semata mata membaca peta politik yang ada di daerahnya. Semenjak lulus dari kampus dan mendapat pendidikan politik di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Th kemudian tertarik pada hal hal yang bersifat politis.

"saya dulu ikut eksternal kampus saya ikut Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia setelah itu saya ikut Partai Kebangkitan Bangsa lalu pindah ke Partai Nasional Bangsa pasca reformasi, abis itu vakum lalu 2012 saya ditarik mas anas buat gabung demokrasi dan jadi ketua pembina demokrasi, namun pasca kena kasusnya mas anas ya saya pindah mas. Konyol kalo saya masih tetap disana."



Menurut TH perindahan seorang kader ke partai lainnya adalah hal yang wajar. Baginya politik merupakan aktualisasi dari kekuatan koneksi, hal tersebut di wujudkannya pada saat ia pindah ke partai abangan ia mengajukan beberapa syarat. Syarat tersebut berupa adanya hari santri nasional, dan permintaannya untuk menjadikan gubernur jakarta menjadi seorang presiden. Alhasil ketika partai abangan tersebut menerima syarat yang diajukan oleh TH membuat TH pindah haluan ke partai abangan. Baginya ini merupakan dari kekuatan koneksi yang dimilikinya. Menurutnya sangat jarang bagi seorang wakil ketua DPP partai tingkat kabupaten untuk pindah partai.

"kekuatan politik itu ya koneksi mas gabisa diganggu gugat. Makanya setelah itu saya masuk ke partai abangan 2013 dengan mengajukan 2 syarat yaitu hari santri nasional dan gubernur jakarta jadi presiden. Waktu itu perhitungannya harus matang mas apalagi saya jadi ketua pembina demokrasi setingkat pembina partai pindah itu hebat mas. Kenapa harus matang ya karena partai ini merupakan partai penantang mas. Makanya waktu itu partai abangan menerima tawaran saya yaudah saya juga pindah akhirnya."

Dari masuknya dia ke partai ia mengakui bahwa pasca reformasi permainan dan peta politik dapat dimainkan melalui politik uang. Meskipun begitu ia juga menjelaskan bahwa beberapa orang masih berpegang teguh pada golongannya. Bagi TH ideologi tentang uang kini sudah menjadi jalur politik yang diambil oleh setiap partai politik untuk memenangkan pentas politik. Menurut TH keinginan partai politik tidak lebih hanya memikirkan tentang kekuasaan. TH juga mengungkapkan bahwa permainan politik uang sudah jadi syarat untuk mempermudah seseorang maju menjadi pemimpin.

Bahkan TH juga mengungkapkan bahwa tidak hanya uang namun menjanjikan investasi kepada para pengusaha merupakan jalur lain dari politik uang. Akan tetapi akhirnya TH menyadari kalau perihal tersebut tidak semata mata kesalahan kader ataupun calon legislatif serta timses partai, akan tetapi juga dikarenakan sedikitnya pendidikan politik di wilayah kelas bawah. Oleh karena itu beberapa kasus negatif di tentang pemilu sering terulang kembali.

Pengaruh Uang dan Perubahan Pandangan Politik

Praktik demokrasi nampaknya belum berjalan begitu lancar seperti apa yang diharapkan. Para kader maupun caleg masih menggunakan hal yang melukai demokrasi. Bagi kebanyakan dari mereka masih beranggapan bahwa politik uang nampaknya masih menjadi jalan pintas paling cepat dalam mengumpulkan suara dan meraih kemenangan untuk partainya. Hal yang sebenarnya sangat ironis melihat masih banyaknya caleg menggunakan politik uang dalam praktik politik mereka. Praktik demokrasi yang seharusnya memberikan kebebasan serta hak yang sama justru dimanfaatkan calon pemimpin untuk membeli suara seseorang. Hanya sedikit dari para caleg maupun pemilih yang menyadari bahwa praktik politik uang ini mencederai proses demokrasi.

Minimnya pemahaman tentang buruknya politik uang ditambah dengan kualitas ekonomi yang menengah kebawah pada akhirnya dimanfaatkan oleh calon legislatif untuk mendapatkan suara lewat politik uang. Meskipun dalam peraturan pemilihan seharusnya semua praktik politik uang dan yang terbukti bermain politik uang akan didiskualifikasi atau pembatalan menjadi calon legislatif. Namun nyatanya peraturan itu hanya dianggap sebagai sebuah gertakan semata oleh panitia kepada para caleg. Dalam etika politik memberikan uang untuk masyarakat berharap agar terpilihnya partai politik tertentu berdampak kepada perubahan pandangan politik, yaitu perubahan yang pada akhirnya menghambat partisipasi politik. Masyarakat dalam hal ini hanya menjadi objek eksploitasi politik oleh pihak yang memiliki kekuasaan (Patrick Jimvrey Rimbing, 2015).

Perihal tersebut ditunjukkan pada beberapa pertemuan atau kesempatan disaat ketika adanya rapat musyawarah para caleg juga diarahkan untuk melakukan praktik politik uang. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh AK dan TH misalnya. Keduanya mengakui dalam praktek politik, politik uang sudah menjadi cara untuk merubah pandangan politik seseorang. Kefanatikan seseorang terhadap golongannya itu sudah mulai tergantikan oleh uang.

Perubahan pandangan politik pada partai politik sesungguhnya hanya bergelut dalam lingkaran kelompok yang berlomba dalam menguasai partai. Persoalan tersebut seperti halnya yang dikatakan Gary W. Cox, yang mana proses munculnya partai dasarnya merupakan ketetapan elit politik agar ikut sebagai kandidat dalam Pemilu (Marijan, 2012). Kondisi ini kemudian dianggap wajar di sistem perpolitikan Indonesia dimana para petinggi partai beserta jajarannya juga turut andil dalam permainan politik uang. Pada penelitian kali ini peneliti tidak menemukan praktik politik uang secara langsung. Namun perihal yang sering menjadi pertanyaan adalah mengenai praktik politik uang untuk mempengaruhi perubahan pandangan politik seseorang.

Sebagaimana dikatakan dari ungkapan yang dijelaskan oleh ketiga informan utama dan juga hasil observasi maupun wawancara dengan beberapa kader partai, partai politik yang semula berbasis ideologi kini berubah bentuk menjadi basis golongan hingga hari ini namun saat ini terjadi perubahan tak menentu akibat dampak dari adanya politik uang. Para pemilih memiliki kecenderungan menerima politik uang tersebut dan mengabaikan golongannya, kecuali mereka yang memiliki pemahaman lebih tentang buruknya politik uang.

Para caleg juga menyadari bahwa dengan adanya politik uang terdapat sebuah celah yang mudah untuk mendapatkan suara lewat uang. Caleg tidak semata mata melakukan politik uang tanpa maksud dan tujuan tertentu. Caleg menyadari bahwa jumlah jumlah yang akan diterimanya nanti apabila terpilih akan lebih banyak daripada yang ia keluarkan saat melakukan politik uang. Terdapat beberapa macam cara pemberian uang dari kandidat kepada para anggota dewan yang terlibat dengan politik uang. Beberapa cara itu ialah: dengan sistem ijon, melalui tim sukses calon, Memanfaatkan orang terdekat, maupun Dalam bentuk *cheque*.

Seperti yang diungkapkan oleh Simmel dalam *philosophy of money* ia menjelaskan bahwa terjadi sebuah paradoks dari tujuan uang sebenarnya. Ia melihat sebuah efek dari uang mempengaruhi gagasan nilai, moral ataupun nilai individu. Sebagaimana seseorang membuat harga atas dirinya sendiri, dimana nilai setiap orang memiliki nilai yang berbeda atas individu lainnya (Suharyono, 2020). Sebagai contoh bagaimana seorang caleg memberikan uang terhadap orang yang bekerja sebagai petani terhadap pejabat di daerah tersebut. Dalam hal ini terjadi sebuah perbedaan kelas yang juga mempengaruhi pemberian uang untuk melakukan politik uang. Seperti yang dilakukan oleh caleg pada umumnya enggan untuk memberikan kepada para pejabat karena dianggapnya pejabat desa tidak amanah dalam politik uang.

Politik uang di Kecamatan Pagelaran terjadi dengan beberapa macam trik, yang paling umum adalah dengan rumah ke rumah. Contoh lainnya seperti pemberian sebuah barang, sejumlah uang, maupun jasa. Pemberian barang umumnya berbentuk pakaian, sembako ataupun peralatan rumah tangga. Apabila jasa, melalui pelayanan kesehatan, hiburan, pertunjukan, layanan pendidikan maupun janji pemberian uang. Pemberian uang, dilakukan dengan berbagai cara terutama melalui pintu ke pintu sebagai cara paling umum yang paling sering dilakukan. Cara lain adalah keluarga caleg ataupun relawannya diberikan uang pada beberapa orang penting seperti pejabat desa pada saat acara pengajian ataupun keagamaan. Cara lainnya adalah memberi uang kepada lansia, bahkan anak-anak.

Tidak dapat dipungkiri bahwa para pejabat desa memiliki suara yang cukup besar di desanya. Hal tersebut seperti dalam konteks yang diungkapkan oleh TH bahwa seorang caleg tidak hanya memberikan uang namun juga dapat memberikan sebuah janji untuk investasi. Namun menjadi pertimbangan bagi para caleg untuk mendekati pejabat desa agar mau berkompromi. hal ini dikarenakan pejabat desa masih seringkali melakukan perubahan pandangan politik meskipun sudah dijanjikan sesuatu.

Sebuah kritik tajam seperti apa yang dikatakan Simmel diawal tentang *Philosophy of Money* dengan seseorang memiliki nilai lebih akan dinilai dalam bentuk murni dan potensi (yaitu, uang), mereka mendapatkan sejumlah "kebebasan" dalam pengertian teknis semata, karena mereka sekarang dapat ditukar. Ketika datang ke manusia yang lebih otonom, kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam segala bentuk kehidupan selama mereka punya uang untuk melakukannya membuat mereka lebih bebas untuk mengambil berbagai peran dalam kehidupan (Suharyono, 2020).

Ketiga informan juga mengutarakan bahwa tren politik uang sudah menjalar di semua partai. Meskipun ada beberapa kader yang tidak setuju namun ia tetap harus mengikuti caleg tersebut agar meraih kemenangan. Maka tidak mengherankan perubahan pandangan politik di Kecamatan Pagelaran pasca reformasi sangat dipengaruhi dengan adanya politik uang oleh para calegnya.

SIMPULAN

Politik uang di Kecamatan Pagelaran masih jadi salah satu taktik bagi partai politik dalam merubah pandangan politik seseorang. Tentunya diperlukan proses yang panjang bagi mereka untuk melakukan perubahan pandangan politik. Meskipun pasca reformasi ini kefanatikan seseorang atas golongannya sudah jauh lebih sedikit ketimbang masa orde baru, namun hal tersebut tidak berarti politik uang sepenuhnya dapat merubah pandangan politik seseorang hanya berdasarkan uang. Pun ditambah lagi dengan adanya ikatan pertemanan membuat seseorang semakin merasa adanya teman seperjuangan sehingga uang tidak begitu berarti dibandingkan teman. Kehidupan perpolitikan yang dilalui seorang individu satu dan yang lainnya tidak memiliki sebuah kesamaan dan penuh dinamika di dalamnya. Melakukan perubahan pandangan politik ataupun mendukung teman seperjuangannya merupakan keputusan sehingga akhirnya membuat seseorang mempunyai arah pandangan perpolitikan berbeda beda pada preferensi politik mereka.

Kontestasi pemilihan calon pemimpin justru kerap kali menjadi ajang perubahan pandangan politik lewat uang. Terlebih dengan kepemilikan modal yang dimiliki oleh para calon legislatif, semakin membuat distingsi antara calon pemimpin satu dan yang lainnya. Mereka para pemilih hanya menjadi komoditas daripada calon legislatif. Maka tak heran apabila para pemilih tersebut hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh calon legislatif yang membayar dirinya. Tentunya hal yang dikhawatirkan adalah akhirnya perubahan politik akibat politik uang semakin langgeng. Sebuah dampak yang semestinya harus dengan cepat ditindaklanjuti sebagai sebuah kelemahan dari sistem demokrasi, sebenarnya caleg maupun pemilih harus terus diberikan edukasi tentang bahayanya politik uang. agar sistem politik demokrasi mampu menjadi lebih baik daripada saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, R. S. (2018). Rasionalitas Pemilih Bupati Tulungagung Pada Pilkada Tahun 2018. *Jurnal Mahasiswa Unesa*, 1-6.
- Damsar. (2015). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta : Prenada media Group.
- Fauzi, A., Sudrajat, A., Affandi, A., & Raditya, A. (2018). Maintaining Identity Political Culture In Indonesia. *Journal of Physics: Conference Series*, 953.
- Fauzi, A. M. (2018). Politik Kebijakan Pemberantasan Korupsi. *UNESA UNIVERSITY PRESS*.
- Fitriani, L. U., Karyadi, L. W., & Chaniago, D. S. (2019). Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 1(1), 53-61. <https://doi.org/10.29303/resiprokal.v1i1.5>
- Geertz, C. (1960). *Agama Jawa, Abangan, santri, priyayi* (moh zaki (ed.)). Jakarta : Komunitas Bambu.
- Gustia. (2015). *Tinjauan kriminologis terhadap kejahatan money politik pada penyelenggaraan pemilihan umum anggota legislatif*. Makassar : Perpustakaan Fakultas Hukum Unhas.
- Ismawan, I. (1999). *Pengaruh Uang dalam Pemilu*. Yogyakarta : Media Presindo.
- Lexy J. Moleong. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Marijan, K. (2012). *Sistem Politik Indonesia, Konsolidasi Demokrasi Pasca- Orde Baru*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Miles, M. ., & A.M., H. (2009). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru (I)*. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Patrick Jimvrey Rimbing. (2015). Money Politics dalam pemilihan legislatif di kota Manado tahun 2014 (suatu studi di dapil 1 kecamatan sario dan kecamatan malalayang). *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 2.
- Putri, M. I. D., Arifani, N., Ratnasari, D., Auliavia, M. V., & Nuriyah, S. (2020). Politik dan Tradisi: Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa. *Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 17(2), 72. <https://doi.org/10.36451/j.isip.v17i2.46>
- Ricklefs, M. C. (2008). *Sejarah Indonesia Modern* (Fourth Edi). Jakarta : PT Serambi Ilmu Alam Semesta.
- Suharyono. (2020). *Filsafat uang*. Jakarta : Lembaga Penerbitan Universitas Nasional



- Wahyu, M. (2015). *Perilaku Politik Warga Timbulharjo Dalam Pemilihan Lurah Desa Tahun 2013*. Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga.
- Wismabrata, M. H. (2019). *6 Fakta "Serangan Fajar" Sejumlah Oknum Caleg, Dimarahi Warga hingga Rampas Ponsel Petugas TPS*. Kompas Tv.

